



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-13951-40986-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Klinik Pengadaan Barang/Jasa

1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang (setda.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang atau lebih di kenal dengan nama atau istilah pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek atau kegiatan tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang yang dilakukan dan bersifat umum dari pengadaan barang seperti konsultan. Selama ini pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang dilakukan dengan cara langsung mempertemukan kepada pihak pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa dan pengguna barang dan jasa, proses yang dilakukan dengan cara fisik ini memiliki beberapa

kelebihan dan kelemahan yang di dapat yaitu para pengguna dan penyedia barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang bertemu secara langsung dan melakukan tahapan demi tahapan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang secara bersama-sama. Tetapi kelemahan dari tahapan demi tahapan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Batang konvensional ini di nilai banyak merugikan seperti mudahnya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selain itu dari pada pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang pada pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pada suatu daerah. Dimana kegiatan pengadaan barang dan jasa ini ditetapkan dalam Perpres No.16 tahun 2018 pasal 1 angka 1 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya di sebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang dibiaya oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banteng merupakan bagian penting yang tidak dapat di pisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Batang di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konstataasi ini pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang menjadi praktek rutin, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di erareformasi ini, kebutuhan masyarakat akan desentralisasi serta transparansi pelayanan pemerintah sanagtlah penting. Perkembangan teknologo informasi menghasilkan titik cerah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah dalam memperoleh masukan dari masyarakat. Pengguna teknologo informasi dalam pengadaan barang dan jasa ini membangu8 suatu sistim antara masyarakat dengan pemerintah yang dikenal dengan sebutan atau istilah E-Procurement (Electric Pocurement) E-procurenmen adlah suatu bentuk sistim baru dalam pengadaan barang dan jasa yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis ONLINE Web.

Adapun permasalahan yang dihadapi sekarang ini masih banyak teman-teman OPD pada saat penginputan data kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang tidak sesuai yang tercantum dalam RKA sehingga ada beberapa OPD lingkup pemerintah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdapat adanya berbagai kekurangan

Adapun solusi dalam mengatasi dan memecahkan masalah tersebut timbulnya suatu gagasan membuat KLINIK PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN Batang . Pemasalah terkait dengan oingimputan data kegiatan tidak sesuai dengan RKA. Dapat terealisasi dengan hadirnya Klinik Layanan Bimbingan Teknis . dari hasil temuan Inspektorat provinsi Jawa Tengah yaitu membuat suatu Klinik Layana Bimtek Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang .

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

a. Jangka pendek

- Mewujudkan Runag Klinik Bimtek, sebagai wadah peneyelenggaraan Bimbingan Tekhnis bagi OPD-OPD yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang secara Elektronik
- Menetapkan Tim Kerja pokja pengadaan dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik pada bagian admistrasi pembangunan dan PBJP Kabupaten Batang

b. Jangka panjang

- Mewujudkan LPSE Kabupaten Batang sebagai sarana dan Prasarana yang dapat menyatukan semua paket pelelangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang dengan dsatu pintu melalui unit layanan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Batang
- Mengevaluasi tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Batang

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat yang iingin dicapai dalam mengoptimalkan peningkatan pemanfaatan pengelolaan barang dan jasa pemerintah adalah :

- Terwujudnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparansi dan akuntabel sebagi cermin peningkatan mutu pelayanan yang bersinergi
- Terlaksananya pemanfaatan ruang data penginputan sebagi sarana penunjang dalam proses pelelangan.
- Terwujudnya ketrlibatan steakholder dalam mendukung program pelayanan kepada penyedia barang dan jasa pemerintah
- Terwujudnya perubahan sistim yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa
- Termotivasinya penyedia local untuk bersaing secara sehat dalam proses pelelangan

1.11. Hasil Inovasi

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

09-12-2019

1.13. Waktu Implementasi

06-01-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

38.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	Klinik Pengadaan Barang/Jasa
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PENGADAAN BARANG / JASA
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	-	Tidak Tersedia
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PENGADAAN BARANG / JASA
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN KLINIK PENGADAAN BARANG / JASA

11.	Kemudahan Informasi Layanan	-	Tidak Tersedia
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13.	Keterlibatan aktor inovasi	-	Tidak Tersedia
14.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	-	Tidak Tersedia
15.	Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16.	Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	IAPORAN SURVEI KEPUASAN
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	Profil Klinik Pengadaan